

PERAN ELIT LOKAL DALAM TRANSFORMASI PERTANIAN PADA MASYARAKAT MATRILINEAL DAN EKS-TRANSMIGRASI PATRILINEAL DI KABUPATEN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT

Humaidi*, Asdi Agustar, Ira Wahyuni Syarfi, Indraddin

Program Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Email Korespondensi: hum_oke@yahoo.co.id

Abstract

Agricultural transformation exhibits distinct dynamics between matrilineal and Ex-transmigration Patrilineal communities in Dharmasraya Regency. Explanations regarding how local elites fulfill their roles within the context of these two distinct cultural systems remain inadequate. The limitations of this study have created a knowledge gap regarding the relationship between local leadership, social structure, and agricultural transformation in rural areas. This study aims to analyze the role of local elites in agricultural transformation among matrilineal and ex-patrilineal transmigration communities in Dharmasraya Regency. This study employs a qualitative approach using the case study method. Data collection techniques included in-depth interviews, documentation, and triangulation. Research informants consisted of officials from the Agriculture Office, local elites, field agricultural extension workers, farmer group leaders, and farmers. Data analysis utilized the Miles and Huberman interactive model. The results indicate that the role of local elites in agricultural transformation within the two communities exhibits distinct characteristics. In the matrilineal community, agricultural transformation was dominated by external actors, namely field agricultural extension workers, while the role of local elites was primarily that of administrative mediators. Conversely, in the patrilineal former transmigration community, local elites held a dominant position as leaders, mediators, controllers, and agents of change in agricultural transformation. This study concludes that the acceleration of agricultural transformation, the enhancement of farmers' institutional capacity, and the shift in agricultural orientation from subsistence to commercial are significantly influenced by the active involvement of local elites.

Keywords: Local Elite, Agriculture Transformation, Matrilineal Society, Ex-transmigration Patrilineal, Dharmasraya

Abstrak

Transformasi pertanian menunjukkan dinamika yang berbeda antara masyarakat matrilineal dan eks-transmigrasi patrilineal di Kabupaten Dharmasraya. Penjelasan mengenai bagaimana elit lokal dalam menjalankan perannya dalam konteks dua sistem budaya yang berbeda belum memadai. Keterbatasan kajian ini menimbulkan kesenjangan pengetahuan tentang hubungan antara kepemimpinan lokal, struktur sosial dan transformasi pertanian di pedesaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran elit lokal dalam transformasi pertanian pada masyarakat matrilineal dan eks-transmigrasi patrilineal di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumentasi dan triangulasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat Dinas Pertanian, elit lokal, penyuluh pertanian lapangan, ketua kelompok tani dan petani. Analisa data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran elit lokal dalam transformasi pertanian pada dua komunitas memiliki karakteristik yang berbeda. Pada masyarakat matrilineal, transformasi pertanian didominasi oleh aktor eksternal yakni penyuluh pertanian lapangan, sementara keberadaan elit lokal lebih pada fungsi mediator administratif. Sebaliknya pada eks-transmigrasi patrilineal, elit lokal memiliki posisi yang dominan sebagai pengarah, mediator, pengontrol dan agen perubahan dalam transformasi pertanian. Dapat disimpulkan bahwa percepatan transformasi pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan perubahan orientasi pertanian dari subsisten menuju komersial sangat dipengaruhi oleh keaktifan keterlibatan elit lokal.

Kata Kunci: Elit lokal, Transformasi Pertanian, Masyarakat Matrilineal, Eks Transmigrasi Patrilineal, Dharmasraya

How to Cite: Humaidi, Agustar, A., Syarfi, I. W., Indraddin (2026) 'Peran Elit Lokal Dalam Transformasi Pertanian Pada Masyarakat Matrilineal dan Eks-Transmigrasi Patrilineal Di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat', *Jurnal Silva Samalas: Journal of Forestry and Plant Science*, 9 (1), pp. 27-36.

Copyright© 2026, Humaidi et al
This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Transformasi pertanian yang ditandai dengan penggunaan teknologi, perubahan sistem produksi, kelembagaan dan orientasi ekonomi petani merupakan bagian penting dari pembangunan pedesaan. Transformasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis dan ekonomi tetapi juga oleh struktur sosial, budaya dan kepemimpinan lokal dalam perspektif sosiologi pembangunan. Scott (1976) menjelaskan bahwa petani tradisional cenderung mempertahankan strategi subsistensi sehingga lebih berhati-hati dalam menerima inovasi yang dianggap beresiko. Sementara itu, Tjondronegoro (2008) menegaskan bahwa perubahan agraria sangat dipengaruhi oleh pola penguasaan lahan, hubungan sosial, dan elit lokal yang memiliki legitimasi di masyarakat.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa elit lokal memiliki peran penting dalam mendorong transformasi pertanian. Syahyuti (2014) menemukan bahwa kelembagaan lokal dan kepemimpinan desa berkontribusi terhadap penyebaran inovasi dan penguatan kelompok tani. Sedangkan Usman (2015) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pedesaan tergantung pada sinergi antara pemerintah, elit lokal dan partisipasi masyarakat. Penelitian Suryana (2018) menunjukkan bahwa masyarakat matrilineal cenderung memerlukan legitimasi adat dalam menerima inovasi, sementara Wahyuni (2020) menemukan bahwa masyarakat eks-transmigrasi lebih cepat beradaptasi dengan perubahan struktur sosialnya relatif lebih terbuka.

Kabupaten Dharmasraya merupakan wilayah yang memiliki keberagaman sosial budaya, ditandai oleh keberadaan masyarakat minangkabau berbudaya matrilineal dengan sistem tanah ulayat (tanah yang dimiliki secara komunal oleh suatu kelompok kekerabatan adat dan dikelola berdasarkan hukum adat Minangkabau. Hak atas tanah tersebut tidak berada pada individu, melainkan pada kelompok masyarakat adat yang diwakili oleh pemimpin adat) yang kuat dan eks-transmigrasi berbudaya patrilineal yang lebih berorientasi pada kepemilikan individual dan ekonomi pasar. Karakter budaya yang beragam itu berpeluang menciptakan respons yang berbeda pula terhadap inovasi dan program pembangunan pertanian. Meskipun berbagai program modernisasi telah dilaksanakan, proses transformasi pertanian dikedua kelompok masyarakat tersebut menunjukkan dinamika yang berbeda, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana elit lokal berperan dalam mempengaruhi proses perubahan tersebut.

Sejumlah studi telah menelaah hubungan antara kepemimpinan lokal, elit lokal, dan proses pembangunan maupun pengelolaan sumber daya di tingkat komunitas. Penelitian menunjukkan bahwa elit lokal memiliki peran penting dalam memengaruhi arah perubahan sosial, ekonomi, dan tata kelola sumber daya melalui kapasitas kepemimpinan, legitimasi, serta penguasaan jaringan sosial dan politik (Warren & Visser, 2016; Haboddin & Afala, 2020). Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada satu komunitas atau satu konteks sosial tertentu, sehingga penelitian komparatif yang membandingkan peran elit lokal dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan yang berbeda, khususnya masyarakat matrilineal dan eks-transmigrasi patrilineal, masih relatif terbatas (Warren & Visser, 2016). Keterbatasan tersebut menimbulkan kesenjangan pengetahuan mengenai bagaimana konteks sosial budaya memengaruhi efektivitas peran elit lokal dalam mendorong transformasi pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran elit lokal dalam transformasi pertanian pada masyarakat Minangkabau berbudaya matrilineal dan masyarakat eks-transmigrasi berbudaya patrilineal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

METODE PELAKSANAAN

a). Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial mengenai peran elit lokal dalam transformasi pertanian pada masyarakat dengan karakter budaya yang

berbeda. Metode studi kasus digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai dinamika sosial yang terjadi pada masyarakat matrilineal dan eks-transmigrasi patrilineal di Kabupaten Dharmasraya.

b). Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di dua nagari (merupakan kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau yang mempunyai batas wilayah tertentu, memiliki penduduk, pemerintahan adat, harta kekayaan, serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan filosofi adat Minangkabau dan ketentuan hukum yang berlaku (Navis, 1984; Kato, 1982) di Kabupaten Dharmasraya, yaitu Nagari Sungai Dareh di Kecamatan Pulau Punjung yang mempresentasikan masyarakat Minangkabau berbudaya matrilineal dan Nagari Sungai Duo di Kecamatan Sitiung yang mempresentasikan masyarakat eks-transmigrasi berbudaya patrilineal. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya masyarakat serta dinamika aktivitas pertanian yang berkembang di kedua lokasi tersebut.

c). Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam aktifitas pertanian dan pembangunan pedesaan. Informan terdiri dari pejabat Dinas Pertanian, elit lokal formal (wali nagari/pemerintahan) dan elit lokal non formal (tokoh adat, tokoh agama, tokoh ekonomi), penyuluh pertanian lapangan (PPL), ketua kelompok tani dan petani.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan triangulasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai peran elit lokal, hubungan sosial masyarakat, pola kepemimpinan, serta dinamika transformasi pertanian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data monografi nagari, laporan kegiatan pertanian dan dokumentasi kelembagaan kelompok tani.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode guna memastikan konsistensi data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh fakta bahwa elit lokal berperan sebagai aktor kunci kelembagaan lokal, menghubungkan masyarakat dan kebijakan pembangunan pertanian dalam transformasi pertanian pada masyarakat matrilineal dan eks-transmigrasi patrilineal di Kabupaten Dharmasraya. Elit lokal memiliki legitimasi sosial-kultural yang mempengaruhi arah kebijakan, mediasi kepentingan, sosial, serta dorongan terhadap adopsi inovasi pertanian selain berfungsi secara administratif.

Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan karakter peran elit lokal pada kedua komunitas. Pada masyarakat matrilineal, peran elit lokal cenderung terbatas dan administratif, sedangkan pada masyarakat eks-transmigrasi patrilineal lebih aktif, dominan dan terlibat langsung dalam proses transformasi pertanian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan lokal dalam mendorong perubahan dipengaruhi struktur sosial budaya. Berdasarkan hal tersebut, analisis hasil penelitian difokuskan pada empat dimensi utama peran elit lokal, yaitu sebagai pengarah, mediator, pengontrol dan agen perubahan dalam transformasi pertanian di Kabupaten Dharmasraya.

Peran pengarah merupakan kemampuan elit dalam menentukan arah pembangunan pertanian, mempengaruhi perilaku petani, dan mengoordinasikan aktor lokal dengan kebijakan pemerintah. Peran elit lokal sebagai pengarah dalam transformasi pertanian pada penelitian ini menekankan pada indikator proses pengambilan keputusan, pola kepemimpinan, partisipasi masyarakat serta kemampuan mendorong adopsi teknologi.

Hasil penelitian mengindikasikan perbedaan yang jelas antara kedua lokasi. Di Nagari Sungai Dareh (matrilineal), proses pengarah pembangunan pertanian lebih didominasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), sehingga peran elit lokal cenderung bersifat normatif dan terbatas pada dukungan sosial-kultural. Pola pendekatan yang digunakan bersifat top-down berbasis program

pemerintah, dengan tingkat keterlibatan elit lokal yang rendah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, akses pengetahuan dan inovasi pertanian lebih banyak berasal dari institusi formal dibandingkan dari jaringan lokal.

Sebaliknya, di Nagari Sungai Duo (eks-transmigrasi), elit lokal menunjukkan peran yang lebih aktif dan kolaboratif bersama kelompok tani dan PPL dalam mengarahkan pembangunan pertanian. Proses ini ditandai oleh pendekatan partisipatif dan berbasis jejaring sosial, di mana elit lokal berfungsi sebagai penghubung antara petani, kelembagaan kelompok tani, dan pemerintah. Tingkat inisiatif, pemahaman terhadap inovasi pertanian, serta keterlibatan dalam distribusi informasi dan pengambilan keputusan relatif lebih tinggi dibandingkan di Sungai Dareh.

Secara umum, masyarakat matrilineal masih dipengaruhi orientasi tradisional dan subsisten, sedangkan masyarakat eks-transmigrasi menunjukan pola kepemimpinan yang lebih partisipatif dan adaptif. Perbedaan ini terlihat pada penentuan komoditas, praktik bertani, adopsi teknologi serta tingkat partisipasi dalam musyawarah.

Adapun sintesis komparatif mengenai peran elit lokal sebagai pengarah dalam transformasi pertanian pada kedua lokasi penelitian disajikan pada matrik 1 berikut.

Tabel 1. Sistesis Komparatif Peran Elit Lokal sebagai Pengarah dalam Transformasi Pertanian dilokasi Penelitian

Indikator	Nagari Sungai Dareh	Nagari Sungai Duo
Penetapan Komoditas	Dominan diarahkan PPL	Kolaboratif PPL dan Wali Nagari
Praktik Bertani	Elit lokal yang tidak aktif	Elit lokal aktif
Adopsi Teknologi	Lambat	Cepat
Musyawarah Kelompok	Partisipasi rendah	Partisipasi yang tinggi
Kontrol Kelompok	Tidak langsung	Partisipatif
Karakter Pengarahan	Teknis-sentralistik	Kolaboratif-partisipatif

Berdasarkan tabel 1, ditemukan adanya perbedaan karakter pengarahan antara Nagari Sungai Dareh dan Nagari Sungai Duo. Pada Nagari Sungai Dareh, proses transformasi pertanian cenderung didominasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), terutama dalam penentuan komoditas dan praktik bertani. Elit lokal seperti wali nagari (pimpinan pemerintahan nagari di Minangkabau yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat nagari untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku), niniak mamak (laki-laki dalam garis kekerabatan ibu (mamak) yang diberi gelar adat dan berfungsi sebagai pemimpin kaum dalam sistem matrilineal Minangkabau, yang bertugas mengatur, membimbing, serta melindungi kemenakan dalam urusan adat, sosial, dan pengelolaan harta pusaka), ulama dan pengusaha lokal, lebih berperan sebagai pendukung sosial dan belum terlibat aktif dalam pengarahan teknis pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan pola pengarahan bersifat teknis-sentralistik dengan tingkat partisipasi kelompok tani yang relatif rendah serta proses adopsi teknologi yang berlangsung lambat. Sedangkan pada Nagari Sungai Duo justru sebaliknya, dimana elit lokal berperan aktif dalam memberikan pengarahan bidang pertanian.

Peran elit lokal sebagai mediator dalam transformasi pertanian diwujudkan melalui upaya menghubungkan petani dengan sumber daya pembangunan, baik pemerintah, pasar, maupun lembaga ekonomi. Fungsi ini tidak hanya mencakup fasilitas bantuan dan informasi, tetapi juga penguatan jejaring sosial, kelembagaan petani, serta peningkatan posisi tawar petani dalam pertanian.

Hasil penelitian memperlihatkan perbedaan pola mediasi antara kedua lokasi. Di Nagari Sungai Dareh, peran elit masih bersifat administratif dan pasif, terbatas pada pengesahan bantuan dan fasilitasi formal kelompok tani, sementara hubungan petani dengan PPL, pemerintah dan pasar berjalan secara individual sehingga posisi tawar petani relatif lemah. Sebaliknya di Nagari Sungai Duo, elit lokal berperan aktif dan kolaboratif dalam membangun jaringan dengan pemerintah daerah, lembaga legislatif, BULOG, perusahaan, dan pengusaha lokal melalui kelembagaan nagari dan kelompok tani.

Perbedaan ini menunjukkan adanya hubungan positif antara mediasi elit lokal dan akses petani terhadap bantuan, pasar, dan stabilitas ekonomi, serta semakin kuat pula kelembagaan pertanian ditingkat lokal.

Adapun sintesis komparatif mengenai peran elit lokal sebagai mediator dalam transformasi pertanian pada kedua lokasi penelitian disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Sistesis Komparatif Peran Elit Lokal sebagai Mediator dalam Transformasi Pertanian di Lokasi Penelitian

Indikator	Nagari Sungai dareh	Nagari Sungai Duo
Akses pada bantuan pemerintah	Bersifat administratif, bantuan dipengaruhi jejaring politik kelompok tani	Aktif membangun jejaring dengan pemerintah dan legislatif secara kolektif
Menjembati petani dengan pasar/perusahaan	Petani berhubungan langsung dengan pasar secara individual	Elit lokal membangun kerja sama dengan BULOG, perusahaan dan pengusaha lokal
Menghubungkan petani dengan PPL	Koordinasi petani dan PPL bersifat informasl dan dilakukan secara individual	Elit lokal aktif memperkuat koordinasi petani dengan PPL dan koperasi nagari
Pola mediasi elit lokal	Administratif-pasif dan lemah dalam penguatan kelembagaan petani	Aktif-kolaboratif dengan penguatan jejaring ekonomi dan kelembagaan
Keterlibatan dalam jaringan ekonomi pertanian	Terbatas pada fasilitasi bantuan pemerintah	Berperan Aktif membangun jejaring ekonomi pertanian di tingkat lokal
Dampak terhadap petani	Posisi tawar petani lemah dan bergantung pada pasar	Petani memperoleh kepastian pasar dan stabilitas harga
Karakter mediasi	Formal-administratif dan reaktif	Kolaboratif-ekonomis dan responsive

Tabel 2 menunjukkan bahwa peran mediasi di Nagari Sungai Dareh masih bersifat administratif dan belum berkembang menjadi penghubung strategis antara petani dengan berbagai sumber daya pembangunan. Akses yang lebih besar terhadap bantuan pemerintah ditentukan jejaring politik kelompok tani, sementara hubungan petani dengan pasar, penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan lembaga ekonomi berlangsung secara individual sehingga posisi tawar petani relatif lemah dan tidak terorganisir secara kelembagaan.

Sebaliknya, di Nagari Sungai Duo, elit lokal menunjukkan peran mediasi yang lebih aktif, kolaboratif, dan terstruktur dalam menghubungkan petani dengan pemerintah, pasar, serta lembaga ekonomi pertanian. Wali nagari bersama kelembagaan lokal secara aktif mengembangkan jaringan dengan pemerintah daerah, legislatif, BULOG, perusahaan penampung hasil pertanian, serta pengusaha lokal. Selain itu, hubungan antara petani dan PPL juga diperkuat melalui kelembagaan koperasi nagari dan pola koordinasi kolektif, sehingga tercipta integrasi kelembagaan yang lebih baik dalam sistem pertanian lokal.

Perbedaan yang ditemukan memperlihatkan bahwa peran mediasi elit lokal yang efektif menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas akses petani terhadap sumber daya pertanian dan stabilitas ekonomi rumah tangga petani. Pada konteks Sungai Duo, mediasi yang bersifat kolaboratif-ekonomis berkontribusi pada peningkatan kepastian pasar dan penguatan posisi tawar petani, sedangkan pada Sungai Dareh, pola mediasi yang masih administratif menyebabkan petani cenderung menghadapi pasar secara individual dengan resiko ketidakstabilan ekonomi yang lebih tinggi.

Dalam transformasi pertanian, elit lokal berperan sebagai pengontrol yang tercermin dari kemampuannya mengatur distribusi sumber daya, mengendalikan akses informasi serta memastikan pemerataan manfaat program pembangunan pertanian di tingkat nagari. Fungsi kontrol ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan sejauh mana elit lokal mampu membangun sistem pengawasan sosial yang adil, transparan dan partisipatif dalam kelembagaan pertanian.

Hasil penelitian memperlihatkan adanya perbedaan pola pengontrolan antara Nagari Sungai Dareh dan Nagari Sungai Duo, baik dalam hal distribusi bantuan, akses informasi, maupun pengaturan kelembagaan pertanian. Perbedaan tersebut mencerminkan variasi kapasitas dan karakter kelembagaan elit lokal dalam mengelola proses transformasi pertanian di masing-masing wilayah.

Adapun sintesis komparatif peran elit lokal sebagai pengontrol dalam transformasi pertanian pada kedua lokasi penelitian disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Sintesis Komparatif Peran Elit Lokal sebagai Pengontrol dalam Transformasi Pertanian di Lokasi Penelitian

Indikator	Nagari Sungai Dareh	Nagari Sungai Duo
Penerima program bantuan	Cenderung dipengaruhi jaringan politik dan bersifat administratif	Ditentukan secara musyawarah dan lebih adil
Distribusi informasi	Terbatas dan belum merata	Terbuka dan terstruktur
Akses lahan & program	Dipengaruhi adat dan jaringan sosial	Fleksibel dan berbasis kepemilikan individu
Karakter control	Administratif, tidak langsung	Partispatif dan kolaboratif
Pola sosial kontrol	Informasi dan berbasis jaringan	Institusional melalui kelembagaan nagari
Dampak ke petani	Ketimpangan akses dan posisi tawar lemah	Akses lebih merata dan posisi tawar lebih kuat

Tabel 3 menunjukkan peran elit lokal sebagai pengontrol dalam transformasi pertanian di Nagari Sungai Dareh masih bersifat terbatas, administratif, dan sangat dipengaruhi oleh jaringan sosial-politik serta struktur adat. Kondisi ini menyebabkan distribusi bantuan dan informasi belum sepenuhnya merata, sehingga program pertanian masih belum terlembaga secara kuat dan ketergantungan pada pihak eksternal dan jaringan informal masih tinggi.

Sebaliknya di Nagari Sungai Duo, peran elit lokal dalam fungsi pengontrol berlangsung lebih institutional dan partisipatif melalui musyawarah nagari dan kelembagaan kelompok tani. Proses pengawasan atas distribusi bantuan, akses informasi, dan pelaksanaan program dilakukan secara lebih transparan dan kolektif. Hal ini menghasilkan pemerataan akses yang lebih baik serta memperkuat posisi tawar petani dalam sistem pertanian lokal. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektifitas fungsi kontrol elit lokal sangat berpengaruh terhadap keadilan distribusi sumber daya pertanian dan kualitas transformasi pertanian di tingkat nagari.

Peran elit lokal sebagai agen perubahan dalam transformasi pertanian merujuk pada kemampuan aktor lokal dalam mendorong, mempercepat, dan mengarahkan proses inovasi pertanian ditingkat nagari. Fungsi tersebut meliputi inisiasi dan difusi teknologi pertanian, penguatan adopsi inovasi, serta penciptaan lingkungan sosial yang mendukung perubahan perilaku petani menuju sistem pertanian yang lebih produktif, adaptif dan berorientasi pasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran agen perubahan pada Nagari Sungai Dareh dan Nagari Sungai Duo memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal sumber inovasi, pola adopsi teknologi, serta kecepatan proses transformasi pertanian. Perbedaan ini merefleksikan perbedaan kapasitas kelembagaan dan tingkat keterlibatan elit lokal dalam mengarahkan perubahan pertanian di masing-masing wilayah.

Adapun sintesis komparatif peran elit lokal sebagai agen perubahan dalam transformasi pertanian pada kedua lokasi penelitian disajikan dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4. Sintesis Komparatif peran Elit Lokal sebagai agen Perubahan dalam Transformasi Pertanian di Lokasi Penelitian

Indikator	Nagari Sungai dareh	Nagari Sungai Duo
Inovasi teknologi	Didominasi oleh PPL dan petani inovator, adopsi bertahap	Kolaborasi wali nagari dan PPL: adopsi lebih cepat
Diversifikasi usaha tani	Fasilitatif: bergantung pembuktian lapangan	Kebijakan adaptif nagari bersifat lebih terstruktur
Akses inovasi	Individual dan bertahap	Aktif dan berbasis kebutuhan lokal
Pola perubahan	Gardyal, kombinasi top-down dan bottom-up	Cepat, terarah dan kelembagaan kuat
Sumber inovasi	PPL dan Petani inovator	PPL, wali nagari dan kebijakan nagari
Karakter agen perubahan	Teknis-adaptif	Kolaboratif-institusional

Tabel 4 menunjukkan bahwa peran elit lokal sebagai agen perubahan dalam transformasi pertanian pada Nagari Sungai Dareh dan Nagari Sungai Duo memiliki perbedaan yang cukup signifikan, terutama dalam hal inovasi, kecepatan adopsi teknologi serta tingkat keterlibatan kelembagaan lokal.

Di Naagari Sungai Dareh, proses transformasi pertanian masih didominasi oleh aktor teknis khususnya Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan petani inovator. Elit lokal cenderung berperan fasilitatif sehingga proses adopsi inovasi berlangsung secara bertahap, selektif dan berbasis pembuktian empiris di lapangan. Pola perubahan ini mencerminkan karakter adaptif (mampu menyesuaikan diri) namun lambat karena kuatnya orientasi kehati-hatian petani terhadap resiko perubahan.

Sebaliknya, pada Nagari Sungai Duo, elit lokal memiliki peran yang lebih aktif sebagai penggerak utama perubahan melalui kolaborasi dengan PPL dan kelembagaan nagari. Inovasi pertanian diinisiasi secara terstruktur dan didukung oleh legitimasi sosial serta kebijakan lokal sehingga proses adopsi teknologi berlangsung lebih cepat dan terarah. Diversifikasi usaha juga lebih sistematis karena didukung oleh kebijakan nagari dan orientasi ekonomi yang lebih terbuka. Temuan secara keseluruhan mengindikasikan bahwa penguatan peran kolaboratif dan institusional elit lokal berkontribusi pada percepatan proses transformasi pertanian di tingkat nagari.

Hasil kajian ini menegaskan bahwa transformasi pertanian di Kabupaten Dharmasraya tidak dapat dilepaskan dari peran elit lokal yang bekerja dalam empat dimensi utama yakni sebagai pengarah, mediator, pengontrol dan agen perubahan. Keempat dimensi tersebut saling berkelindan dan membentuk pola yang berbeda antara masyarakat matrilineal di Sungai Dareh dan masyarakat eks-transmigrasi patrilineal di Nagari Sungai Duo. Perbedaan struktur sosial budaya pada kedua komunitas tersebut terbukti mempengaruhi intensitas, karakter, dan efektivitas peran elit lokal dalam proses transformasi pertanian.

Dalam aspek pengarah, temuan penelitian menunjukkan bahwa di Sungai Dareh, arah transformasi pertanian lebih banyak ditentukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), sementara elit lokal cenderung berperan terbatas dan administratif. Sebaliknya, di Nagari Sungai Duo, elit lokal berperan secara kolaboratif bersama PPL dalam menentukan komoditas, mengarahkan praktik budidaya, serta mendorong adopsi teknologi pertanian. Temuan ini sejalan dengan pandangan Syahyuti (2014) yang menegaskan bahwa efektifitas pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan lokal dalam mengarahkan petani. Dalam konteks ini, keterbatasan peran pengarah di Sungai Dareh dapat dipahami sebagai konsekuensi dari kuatnya struktur adat dan proses pengambilan keputusan kolektif sebagaimana dikemukakan oleh Tjondronegoro (2008), yang menyatakan bahwa struktur agrarian tradisional cenderung memperlambat inovasi karena kompleksitas legitimasi sosial. Interpretasinya, fungsi pengarah tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga sangat ditentukan oleh legitimasi sosial dan posisi institusional elit lokal dalam struktur masyarakat.

Dimensi mediator menunjukkan adanya perbedaan yang semakin tegas antar lokasi penelitian. Di Nagari Sungai Dareh, mediasi elit lokal masih bersifat administratif dan belum mampu memperkuat akses petani terhadap pasar, teknologi, maupun lembaga pembiayaan. Sebaliknya, di Nagari Sungai Duo, elit lokal berperan aktif membangun jejaring dengan pemerintah daerah, BULOG, perusahaan swasta, serta memperkuat kelembagaan petani melalui kolaborasi dengan PPL dan koperasi nagari. Temuan ini memperkuat argumentasi Soerjono Soekanto (2012) dan Usman (2015) yang menekankan bahwa efektifitas pembangunan pedesaan bergantung pada sinergi antara pemerintah, elit lokal dan masyarakat. Dalam interpretasinya, kuatnya fungsi mediasi di Sungai Duo meningkatkan akses sumber daya dan stabilitas ekonomi petani, sementara lemahnya mediasi di Sungai Dareh memperkuat posisi petani yang individualistik dan rentan terhadap fluktuasi pasar.

Dalam aspek pengontrol, temuan penelitian menunjukkan bahwa di Sungai Dareh, kontrol terhadap distribusi bantuan dan informasi masih dipengaruhi oleh jejaring politik dan struktur adat, sehingga cenderung tidak merata. Sebaliknya, di Sungai Duo, pengontrolan berlangsung lebih partisipatif melalui mekanisme musyawarah nagari dan kelembagaan kelompok tani. Temuan ini dapat dijelaskan melalui perspektif James C. Scott (1976) yang menyatakan bahwa masyarakat petani tradisional cenderung menekankan keamanan sosial berbasis relasi personal dibandingkan efisiensi institusional. Dalam konteks ini, lemahnya kontrol institusional di Sungai Dareh berdampak pada ketimpangan akses, sedangkan penguatan kontrol berbasis kelembagaan di Sungai Duo menciptakan

sumber daya yang lebih transparan dan adil. Interpretasinya, kontrol yang terlembaga merupakan syarat penting untuk mewujudkan terciptanya keadilan sosial dalam transformasi pertanian.

Dalam dimensi agen perubahan, perbedaan antara kedua lokasi penelitian terlihat paling nyata dalam kecepatan adopsi inovasi. Di Sungai Dareh, inovasi lebih banyak berasal dari PPL dan Petani inovator sehingga perubahan berlangsung gradual dan berbasis pembuktian empiris. Sementara itu, di Sungai Duo, elit lokal berperan aktif sebagai penggerak inovasi melalui kolaborasi dengan PPL dan kelembagaan nagari, sehingga transformasi berlangsung lebih cepat dan terarah. Temuan ini sejalan dengan Piotr Sztompka (2011) yang menegaskan bahwa perubahan sosial akan lebih cepat terjadi apabila didukung aktor lokal yang memiliki kapasitas institusional dan legitimasi sosial. Selain itu, hasil ini konsisten dengan temuan Indraddin (2020) yang menunjukkan bahwa komunitas terhadap struktur sosial lebih terbuka, seperti eks-transmigrasi, cenderung lebih adaptif terhadap inovasi pertanian. Interpretasinya, keterlibatan aktif elit lokal sebagai agen perubahan mempercepat proses modernisasi pertanian melalui penguatan kelembagaan dan legitimasi sosial inovasi.

Secara keseluruhan, sintesis temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi pertanian tidak semata-mata ditentukan oleh faktor teknologi dan ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur sosial budaya serta kapasitas elit lokal dalam menjalankan fungsi pengarah, mediator, pengontrol dan agen perubahan. Pada masyarakat matrilineal Sungai Dareh, dominasi aktor eksternal dan terbatasnya peran elit lokal menyebabkan transformasi berlangsung lebih lambat. Sebaliknya, pada masyarakat eks-transmigrasi Sungai Duo, keterlibatan elit lokal yang lebih aktif dan kolaboratif mempercepat proses transformasi pertanian. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perspektif sosiologi pembangunan yang memposisikan elit lokal sebagai penghubung utama antara struktur sosial dengan dinamika perubahan ekonomi pedesaan.

KESIMPULAN

Hasil Penelitian ini mengindikasikan bahwa peran elit lokal dalam transformasi pertanian di Kabupaten Dharmasraya mencakup empat dimensi utama yaitu pengarah, mediator, pengontrol, dan agen perubahan dengan intensitas serta efektivitas berbeda antara masyarakat matrilineal di Nagari Sungai Dareh dan masyarakat eks-transmigrasi patrilineal di Nagari Sungai Duo. Di Nagari Sungai Dareh, elit lokal memiliki peran relatif terbatas dan dominan bersifat administratif sehingga fungsi transformasi pertanian lebih banyak dijalankan oleh pihak eksternal seperti Penyuluh Pertanian Lapangan yang menyebabkan proses perubahan berlangsung relatif lambat, bertahap, dan masih kuatnya orientasi subsisten. Sebaliknya, di Nagari Sungai Duo elit lokal menunjukkan peran lebih aktif, kolaboratif, dan institusional dalam seluruh dimensi transformasi pertanian sebagai penggerak utama kebijakan, mediator akses sumber daya, pengontrol distribusi bantuan yang adil, serta pendorong inovasi dan diversifikasi usaha tani sehingga mempercepat transformasi menuju sistem modern berorientasi pasar. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi pertanian tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi dan ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur sosial budaya serta kapasitas dan keterlibatan aktif elit lokal dalam pembangunan pertanian di tingkat nagari.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas elit lokal, terutama pada wilayah dengan struktur sosial matrilineal seperti Nagari Sungai Dareh, agar dapat berperan lebih aktif dalam proses pengarah, mediasi, pengontrolan dan inovasi dalam transformasi pertanian. Selain itu, penguatan kelembagaan nagari dan kelompok tani perlu terus ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah nagari, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta aktor lokal lainnya sehingga transformasi pertanian dapat berlangsung secara lebih terstruktur, keberlanjutan dan berdaya guna. Selanjutnya, akses terhadap informasi, teknologi, dan pasar perlu diperluas secara lebih merata untuk mengurangi kesenjangan antara petani sekaligus memperkuat daya tawar petani ditingkat lokal. Terakhir, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji lebih mendalam faktor-faktor budaya serta jaringan kekuasaan lokal yang mempengaruhi efektivitas peran elit lokal dalam transformasi pertanian di wilayah dengan karakter sosial yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penuliskan sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Dinas Pertanian, wali nagari, penyuluh pertanian lapangan, kelompok tani serta seluruh informasi penelitian yang telah memberikan dukungan dan informasi selama pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, V. et al. (2019). *Does Elite Capture Matter? Local Elites and Targeted Welfare Programs in Indonesia*
- Amandaria, R., Darma, R., Tamsin, S., Rahmadiyah, R., & Untari, U. (2026). *Gender Dynamics in local organizations*. *Frontier in Sociology*, 10.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale*. Cornell University Press.
- Azizah, (2017). *Peran Elit Lokal dalam Penyelesaian Konflik Sosial antara Masyarakat Transmigrasi dan Masyarakat Lokal*. Padang: Universitas Andalas
- Benda-Beckmann, F. von & Benda-Beckmann, K. von. (2013). *Political and Legal transformations of an Indonesian polity*. Cambridge University Press.
- Bernstein, H. (2010). *Class dynamics of agrarian change*. Kumarian Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya. (2025). *Kabupaten Dharmasraya dalam angka 2025*. Pulau Punjung: BPS Kabupaten Dharmasraya
- Bapperida Kabupaten Dharmasraya. (2011). *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031*. Dharmasraya: Bapperida Kabupaten Dharmasraya.
- Geertz, C. (1963). *Agriculture involution*. University of California Press.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia*. Stanford University Press.
- Haryanto, Y., & Yuniarti, W. (2023). *Petani Maju sebagai Agen Pembangunan Pertanian*.
- Indraddin. 2020. *Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigrasi dalam Modernisasi Pertanian di Sumatera*. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(1), Pp. 45-58.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Purnama. (2016). *Peran Elit Lokal dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Keterampilan Petani Transmigrasi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Purnomo, M. et al. (2023). *Transformation Role of Forest Farmer Group's (FFGs) in Indonesia from Development Agent to Brokering Project*.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Putri, R. C., Harahap, I., & Nawawi, Z. (2023). *Transformasi Sektor Pertanian*. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(3).
- Salim. (2018). *Peran Elit Lokal dalam Pemberdayaan Ekonomi Petani Transmigrasi di Sumatera Barat*. Padang: Universitas Negeri Padang
- Scott, J. C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New haven: Yale University Press.
- Schultz, T. W. (1964). *Transformation traditional agriculture*. Yale University Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suryana, A. 2018. *Budaya Lokal dan Adopsi Inovasi Pertanian pada Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat*. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 14(2), Pp. 115-127

- Suryanto. (2019). *Integrasi Sosial Masyarakat Transmigrasi dan Peran Elit Lokal di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya*. Padang: Universitas Andalas.
- Syahyuti. 2014. *Peran Kelembagaan Lokal dalam Pembangunan Pertanian*. Jakarta: IPB Press.
- Sztompka, P. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group
- Tjondronegoro, S. M. P. 2008. *Sosiologi Agraria: Kumpulan Tulisan Terpilih*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Usman, S. 2015. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Wahyuni, I. 2020. Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigrasi dalam Modernisasi Pertanian di Sumatera. *Jurnal Sosilogi Pedesaan*, 8(1), Pp. 45-58